



KETERBUKAAN INFORMASI PT ADI SARANA ARMADA, TBK  
No. 025/ASSA-CORSEC/V/2024

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1) HURUF (C) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 ("POJK 17 TAHUN 2020"), TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2020 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA

**PT ADI SARANA ARMADA TBK**  
**("PERSEROAN")**  
Berkedudukan di Jakarta Utara

Kegiatan Usaha:

Bergerak di bidang:

Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, perdagangan besar mobil bekas, angkutan bermotor untuk barang umum, aktivitas penyewaan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, aktivitas konsultasi transportasi dan reparasi mobil

Kantor Pusat:

Gedung Samudera Kirana, Lt. 6  
Jl. Yos Sudarso No. 88  
Jakarta Utara 14350, Indonesia  
Telp./Phone: (+62-21) 6530 8811  
Faks: (+62-21) 6530 8822

Surel/E-mail: [corporate.secretary@assarent.co.id](mailto:corporate.secretary@assarent.co.id)

Situs web/Website: [www.assa.id](http://www.assa.id)

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 21 Mei 2024

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

**Branches**

Medan	: 061-845 3636	Jakarta 2	: 021-7581 1818	Malang	: 0341-406 363
Batam	: 0778-426 001	Jakarta 3	: 021-5795 7773	Surabaya	: 031-847 6363
Pekanbaru	: 0761-587 000	Jakarta 4	: 021-8952 5555	Bali	: 0361-756 999
Padang	: 0751-442 222	Bandung	: 022-751 1188	Balikpapan	: 0542-733 358
Palembang	: 0711-571 0888	Semarang	: 024-761 2333	Banjarmasin	: 0511-673 0999
Lampung	: 0721-471 111	Yogyakarta	: 0274-282 7333	Makassar	: 0411-880 010
Jakarta 1	: 021-441 8888	Solo	: 0271-788 9399	Manado	: 0431-868 899

**PT Adi Sarana Armada Tbk**

**Head Office:**

Gd. Samudera Kirana, Lt.6  
Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter,  
Jakarta Utara, 14350, Indonesia  
T. (+62-21) 6530 8811  
F. (+62-21) 6530 8822



## **DEFINISI**

- KJPP RSR : Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan
- KBLI : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia
- Perseroan : PT Adi Sarana Armada Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dengan alamat terdaftar di Gedung Samudera Kirana, Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88, Jakarta Utara 14350
- POJK 17/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
- POJK 15/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

## **PENDAHULUAN**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 ("POJK 17 Tahun 2020"), tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dimana Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana perubahan kegiatan usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.

Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan, maksud dan tujuan serta alasan dilakukannya penambahan kegiatan usaha.

### **A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN**

Perseroan berkedudukan di Kota Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 56 tanggal 17 Desember 1999 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya Nomor C-23561 HT.01.01.TH.2002 tanggal 29 November 2002; dan (ii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 48 dan Tambahan Berita Negara Nomor 4748 tanggal 17 Juni 2003.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Adi Sarana Armada, Tbk., Nomor 145 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah: (i) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

("Kemenkumham") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054949.AHA.01.02.2022 tanggal 4 Agustus 2022; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Adi Sarana Armada, Tbk., Nomor AHU-AHA.01.09-0040528 tanggal 4 Agustus 2022.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2003.

Kantor Pusat Perseroan beralamat di Gedung Samudera Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88, Jakarta Utara 14350. Perseroan juga membuka cabang atau perwakilan antara lain di Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Bandung, Padang, Jakarta (Landmark Center I, Pondok Pinang, Tipar Cakung, dan Tambun), Semarang, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Malang, Solo, dan Bali. Saham-saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "ASSA".

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, perdagangan besar mobil bekas, angkutan bermotor untuk barang umum, aktivitas penyewaan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, aktivitas konsultasi transportasi dan reparasi mobil.

Melalui entitas anaknya, Perseroan juga menjalankan aktivitas berikut:

- a. PT Duta Mitra Solusindo  
Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (jasa *outsourcing*).
- b. PT Autopedia Sukses Lestari Tbk  
Penjualan kendaraan bekas dan penyertaan saham pada entitas anak.
- c. PT Tri Adi Bersama (AnterAja)  
Pos komersial/jasa ekspedisi pengiriman barang.
- d. PT Adi Sarana Investindo  
Penyediaan jasa manajemen dan konsultasi khususnya di bidang investasi, yang dimana PT Adi Sarana Investindo melakukan investasi di perusahaan-perusahaan baru.
- e. PT Adi Sarana Transportasi (sebelumnya PT Kargo Bersama Teknologi)  
Pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Erida
Komisaris	: Hertanto Mangkusasono
Komisaris Independen	: Lindawati Gani
Komisaris Independen	: Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto

#### Direksi

Presiden Direktur	: Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
Direktur	: Jany Candra
Direktur	: Tjoeng Suyanto
Direktur	: Jerry Fandy Tunjungan

## **B. URAIAN SINGKAT MENGENAI PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA**

Perseroan bermaksud untuk melakukan Penambahan Kegiatan Usaha, yaitu menambah kegiatan usahanya saat ini dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

### **KBLI No.78300 TENTANG PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA**

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah, Perseroan wajib mengubah Anggaran Dasarnya untuk memuat Penambahan Kegiatan Usaha, khususnya mengubah pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan Perseroan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dan POJK 17/2020, perubahan Anggaran Dasar perlu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan izin atau persyaratan lain yang diperlukan, maka kegiatan usaha tambahan dapat dijalankan.

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha akan dimintakan dalam RUPS Tahun 2024 Perseroan, yang rencananya akan diselenggarakan pada Rabu, tanggal 26 Juni 2024.

## **C. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA**

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang sewa kendaraan bermotor, baik kendaraan beroda empat maupun dua. Sampai dengan saat ini, jasa yang diberikan oleh Perseroan kepada Pelanggan Perseroan adalah penyediaan unit kendaran sewa dan pengemudi (jika diminta oleh Pelanggan).

Pengemudi yang disediakan oleh Perseroan adalah pengemudi milik anak usaha Perseroan yaitu PT Duta Mitra Solusindo, yang bergerak di bidang jasa Penyediaan Tenaga Outsourcing dengan KBLI No. 78300. Sampai dengan tanggal informasi ini disampaikan, tidak ada peraturan yang melarang Perseroan untuk menunjuk subkontraktor/pihak ketiga untuk menyediakan jasa pengemudi.

Namun demikian, salah satu pelanggan dari Perseroan yang bergerak di bidang pertambangan tunduk pada peraturan Mineral dan Batubara, yang dimana setiap penyedia jasa yang menyediakan kendaraan sewa beserta dengan pengemudi, wajib memiliki kegiatan usaha penyediaan pengemudi/operator di dalam Anggaran Dasarnya. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan Perseroan di atas, Perseroan berencana untuk menambahkan KBLI No. 78300 tentang Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia.

## **D. RINGKASAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN DARI PENILAI INDEPENDEN**

Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Ruky, Safrudin & Rekan ("RSR") yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan proposal No. RSR/P-B/FS/280324, tanggal 28 Maret 2024 telah diminta untuk melakukan Studi Kelayakan Keuangan atas Transaksi.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 54/KM.1/2010 tertanggal 25 Januari 2010 mengenai Izin Penilai Yunus N. Purwono, MAPPI (Cert.) yang ditetapkan sebagai penilai di Bidang Jasa Penilaian Bisnis berkualifikasi Penilai Bisnis (B) dengan No. B-1.10.00273 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Bisnis) No. STTD.PB-12/PJ-1/PM.02/2023.

RSR memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011.

Berikut adalah ringkasan Laporan Studi Kelayakan Rencana Penambahan Bidang Usaha di Indonesia No. 00047/2.0095-00/BS/05/0273/1/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang disusun oleh KJPP RSR:

### 1. Objek Studi Kelayakan

Objek dalam Studi Kelayakan Bisnis ini adalah penambahan kegiatan usaha KBLI No. 78300 tentang Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia sehubungan dengan Rencana Perseroan.

### 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Studi Kelayakan Bisnis ini adalah untuk melakukan analisis atas kelayakan rencana penambahan kegiatan usaha yaitu Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia KBLI No. 78300 sehubungan dengan Rencana Perseroan, tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perbankan, dan perpajakan.

Tujuan penugasan adalah untuk melakukan Studi Kelayakan Bisnis untuk keperluan penambahan kegiatan usaha pada perusahaan terbuka.

### 3. Asumsi dan Kondisi Pembatas

#### Asumsi

Laporan Studi Kelayakan Bisnis ini bersifat *non-disclaimer opinion*, KJPP RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Studi kelayakan bisnis, data dan informasi yang diperoleh baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Studi Kelayakan Bisnis ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan yang telah KJPP RSR sesuaikan asumsinya dan telah disetujui oleh manajemen ("Proyeksi Keuangan yang Disesuaikan") sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

KJPP RSR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan menurut pendapat KJPP RSR Proyeksi Keuangan yang Disesuaikan tersebut wajar, namun KJPP RSR tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

KJPP RSR bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan Studi Kelayakan Bisnis.

#### Kondisi Pembatas

Studi Kelayakan Bisnis ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Studi Kelayakan ini, KJPP RSR melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana disediakan oleh manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.

Segala perubahan terhadap data tersebut di atas dapat mempengaruhi hasil Studi Kelayakan KJPP RSR secara material. Oleh karena itu, KJPP RSR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut.

KJPP RSR menganggap bahwa sejak tanggal penilaian hingga tanggal penerbitan laporan Studi Kelayakan, tidak terdapat kejadian luar biasa yang secara material, baik secara makro ekonomi maupun industri, saat ini maupun yang akan datang, dapat berpengaruh terhadap Perseroan.

KJPP RSR ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan KJPP RSR secara khusus hanya terbatas pada aspek finansial, KJPP RSR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Perseroan dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan, karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan KJPP RSR.

#### 4. Metode dan Prosedur Penyusunan Laporan Studi Kelayakan

Metode dan prosedur yang diterapkan dalam menyusun laporan studi kelayakan adalah:

- a. Analisis kelayakan pasar
- b. Analisis kelayakan teknis
- c. Analisis kelayakan pola bisnis
- d. Analisis kelayakan model manajemen
- e. Analisis kelayakan keuangan

#### 5. Kesimpulan Studi Kelayakan

Perseroan memiliki kapasitas serta kemampuan yang cukup untuk melaksanakan Rencana Perseroan. Rencana Perseroan dengan nilai investasi **Rp3,00 miliar** merupakan rencana yang dapat dilakukan oleh Perseroan, dilihat dengan empat metode yaitu NPV sebesar **Rp7,85 miliar**, PBP selama **5 tahun 3 bulan** dengan IRR sebesar **43,68%** yang lebih besar dari WACC sebesar **11,15%** dan P/I sebesar **3,60x** yang lebih besar dari satu.

Berdasarkan hasil analisis RSR atas kelayakan pasar, teknis, pola bisnis, model manajemen, dan keuangan dengan asumsi dan kondisi pembatas yang dijelaskan pada Laporan ini, maka Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah **LAYAK**.

#### E. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI TERKAIT PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha, Perseroan akan mengembangkan infrastruktur bisnis penyedia juru mudi seperti pelatihan dan pendidikan juru mudi, kantor untuk administrasi pengelolaan juru mudi, sistem pengelolaan termasuk penggajian dan renumerasi, unit pendukung, koordinator juru mudi, serta hal-hal yang berkaitan dengan operasional. Biaya investasi yang dikeluarkan oleh Perseroan akan digunakan sebagai dana pelatihan dan pendidikan untuk calon juru mudi serta biaya modal kerja awal.

#### F. PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA KBLI No.78300 TENTANG PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Perubahan kegiatan usaha tersebut diharapkan akan memberikan manfaat bagi Perseroan di masa mendatang.

Dengan dijalankannya rencana Penambahan Kegiatan Usaha, laba usaha Perseroan diperkirakan mengalami peningkatan antara 0,14% sampai dengan 0,24% dan laba bersih Perseroan diperkirakan mengalami peningkatan antara 0,19% sampai dengan 0,79% karena adanya pendapatan tambahan dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Hasil kriteria kelayakan dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha berdasarkan laporan studi kelayakan yang disusun oleh KJPP RSR adalah sebagai berikut:

Net Present Value : Rp7,85 miliar

IRR : 43,68%

Payback Period : 5 tahun 3 bulan

#### G. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada Pemegang Saham melalui RUPS sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan. Dalam hal ini, Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan akan dimintakan pada RUPS yang akan diselenggarakan Perseroan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024  
Tempat : Harris Hotel Kelapa Gading & Convention – Smiley Room Lantai 5, Jalan Boulevard Barat Raya No. 13, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240  
Waktu : 14.00 WIB – selesai

Berikut merupakan tanggal-tanggal penting terkait penyelenggaraan RUPS Perseroan:

Peristiwa	Tanggal
Pengumuman RUPS	20 Mei 2024
Keterbukaan Informasi mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama	20 Mei 2024
Tanggal DPS untuk menentukan Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri RUPS	3 Juni 2024
Pemanggilan RUPS	4 Juni 2024
Perubahan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi	24 Juni 2024
RUPS	26 Juni 2024
Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS	28 Juni 2024
Penyampaian Risalah RUPS	Paling lambat 26 Juli 2024

Selanjutnya, mata acara RUPSLB Perseroan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah:

*“Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka (i) penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan (ii) penambahan bidang usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.”*

Lebih lanjut, RUPS Perseroan akan diselenggarakan Perseroan dengan merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk mata acara khusus perubahan Pasal 3 di atas berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Perseroan.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Poin (1) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Poin (2) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Jika rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham pada RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS tersebut.

#### **H. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 huruf (g) POJK POJK 17/2020, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa: (i) Transaksi Material tidak mengandung Benturan Kepentingan; dan (ii) semua informasi material telah diungkapkan dalam dokumen ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

*(sisa halaman ini sengaja dikosongkan dan lembar penandatanganan pada halaman berikutnya)*



**I. INFORMASI TAMBAHAN**


Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai informasi dari keterbukaan informasi ini harap menghubungi:

**PT ADI SARANA ARMADA TBK**  
Gedung Samudera Kirana, Lt. 6  
Jl. Yos Sudarso No. 88  
Jakarta Utara 14350, Indonesia  
Telp./Phone (+62-21) 6530 8811  
Faks (+62-21) 6530 8811  
Surel/E-mail: [corporate.secretary@assarent.co.id](mailto:corporate.secretary@assarent.co.id)  
Situs web/Website: [www.assa.id](http://www.assa.id)

Jakarta, 21 Mei 2024

  
PT Adi Sarana Armada Tbk

**Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati**  
Presiden Direktur



**Jerry Fandy Tunjungan**  
Direktur